

1. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar:

- A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas
- B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan
- C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi dan efektif
- D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan sama kedudukan didepan hukum
- E. Mandiri jujur adil dan makmur

Jawaban A

2. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah

- A. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
- B. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
- C. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
- D. menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
- E. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Jawaban D

3. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama:

- A. 30 (tiga puluh) hari kerja
- B. 15 (lima belas) hari kerja
- C. 14 (empat belas) hari kerja
- D. 7 (tujuh) hari kerja
- E. 3 (tiga) hari kerja

Jawaban D

4. Parliementary threshold 4% untuk tingkat nasional, mengandung arti...

- A. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- B. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja, dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

C. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD Provinsi, tapi masih akan dapat kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

D. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

E. Semua Jawaban Salah.

Jawaban D

5. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022

- A. 17 Februari 2024
- B. 15 Februari 2024
- C. 14 Februari 2024
- D. 13 Februari 2024
- E. 18 Februari 2024

Jawaban C

6. KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hirarkis ketentuan ini diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa ?

- A. Pasal 5 ayat 3
- B. Pasal 9 ayat 2
- C. Pasal 9 ayat 1
- D. Pasal 1 ayat 5
- E. Pasal 2 ayat 1

Jawaban C

7. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota PPK dan PPS ?

- A. 9-7-5-5-3
- B. 11-7-5-5-3
- C. 7/5-5/7-5-5-5
- D. 9-5/3-5-5-3
- E. 7-5/7-3/5-5/3

Jawaban E

8. Apa kepanjangan dari PPK?

- A. Petugas Pemungutan Kecamatan
- B. Panitia Pemungutan Kecamatan
- C. Petugas Pemilihan Kecamatan
- D. Panitia Pemilihan Kecamatan

E Panitia Pemilu Kecamatan

Jawaban D

9. PPK berkedudukan di mana?

- A. Kantor Kecamatan
- B. Kantor Polsek Kecamatan
- C. Pendopo Kecamatan
- D. Ibukota Kecamatan
- E. Ibu kota desa/kelurahan

Jawaban D

10. Dibawah ini pernyataan yang benar mengenai lama masa kerja PPK?

- A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
- B. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
- C. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
- D. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten kota paling lambat 1 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
- E. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat enam bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat satu bulan setelah pemungutan suara

Jawaban A

11. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali:

- A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.
- B. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
- C. Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.
- D. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
- E. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan

kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk
terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu

Jawaban : B

12. Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK PPS diperpanjang.PPK, PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?

- A. 1 bulan
- B. 2 bulan
- C. 3 bulan
- D. 4 bulan
- E. 5 bulan

Jawaban B

13. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu adalah Pilihlah jawaban yang paling tepat

- A. Bawaslu bersifat tetap. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota dan Panwas bersifat adhoc
- B. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap sementara Bawaslu kabupate/kota dan Panwaslu bersifat adhoc
- C. Bawaslu. Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten dan kota dan Panwaslu bersifat ad-hoc
- D. Bawaslu. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota bersifat tetap Panwaslu bersifat adhoc
- E. Bawaslu Bawaslu Provinsi Bawaslu kabupaten kota dan Panwaslu tetap Panwaslu Desa bersifat ad-hoc

Jawaban D

14. Pernyataan dibawah ini yang bukan merupakan tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan

- A. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan
- B. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kecamatan
- C. Melaksanakan pemuktahiran data pemilih, penetapan data pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
- D. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang
- E. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Jawaban C

15. Pemeriksaan pengaduan dan atau laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh

- A. Dengan Kehormatan KPU

- B. Dewan Kehormatan Bawaslu
- C. Dewan Kode Etik KPU
- D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- E. Dewan Penegakkan Etika Bawaslu

Jawaban D

16. Ketua Bawaslu saat ini adalah

- A. Totok Haryono, SH
- B. Dr. Herwin Jeller Hielsa M, M.H
- C. Puadi, S.Pd, MM
- D. Lolly Suherty, S.sos, M.H
- E. Rahmat Bagja, SH, LL, MM

Jawaban E

17. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum

- A. Perencanaan Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
- B. pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- C. masa kampanye pemilu
- D. pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota
- E. penetapan hasil pemilu

Jawaban D

18. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat..... bulan sebelum hari pemungutan suara

- A. 24
- B. 25
- C. 22
- D. 20
- E. 21

Jawaban D

19. Seluruh tahapan Pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan

- A. Memasang tanda gambar di tempat terlarang
- B. Memberi keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran
- C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah
- D. Berkampanye dengan melanggar Lalu Lintas
- E. Mengubah hasil perhitungan suara

Jawaban E

20. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu ?

- A. KPU, Bawaslu dan lembaga pemantau Pemilu
- B. KPU Bawaslu dan partai politik
- C. KPU Bawaslu lembaga pemantau pemilu dan partai politik
- D. KPU dan Bawaslu
- E. KPU Bawaslu dan tim kampanye

Jawaban D

21. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara

- A. 18
- B. 20
- C. 22
- D. 19
- E. 25

Jawaban A

22. Jumlah kursi anggota DPR RI ditetapkan sebanyakkursi

- A. 352
- B. 445
- C. 350
- D. 577
- E. 575

Jawaban E

23. Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit kursi dan paling banyak kursi

- A. 20 dan 35
- B. 20 dan 45
- C. 20 dan 55
- D. 25 dan 55
- E. 35 dan 75

Jawaban C

24. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

E. 2

Jawaban B

25. Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh

- A. Pantarlih
- B. PPS
- C. PPK
- D. KPU Kabupaten/Kota
- E. semua jawaban benar

Jawaban B

26. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selamantuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat

- A. 17 hari
- B. 10 hari
- C. 14 hari
- D. 15 hari
- E. 20 hari

Jawaban C

27. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan di perolehan kursi paling sedikit dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya

- A. 25%
- B. 20%
- C. 4%
- D. 10%
- E. 15%

Jawaban B

28. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kecuali.....

- A. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pasfoto terbaru
- B. Daftar calon tetap anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota diumumkan oleh PPS
- C. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR
- D. KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi
- E. KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten kota

Jawaban B

29. Hai kampanye pemilu dapat dilakukan melalui

- A. pertemuan terbatas

- B. pertemuan tatap muka
- C. pemasangan alat peraga di tempat umum
- D. rapat umum
- E. Semua jawaban Benar

Jawaban E

30. Metode kampanye pemilihan umum yang dilaksanakan sejak tiga hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang adalah

- A. pertemuan terbatas
- B. pertemuan tatap muka
- C. penyebaran bahan kamarnya kepada umum
- D. pemasangan alat peraga di tempat umum
- E. semua jawaban benar

Jawaban E

31. Dalam Pemilu, Pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan Pemilu yang:

- A. Langsung
- B. Umum
- C. Bebas
- D. Rahasia
- E. Jujur dan Adil

Jawaban C

32. Berikut ini termasuk Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, kecuali ...

- A. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan
- B. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
- C. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
- D. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- E. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Jawaban E

33. Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh.....

- A. KPU Kabupaten/Kota
- B. KPU RI
- C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- D. KPPS
- E. PPS

Jawaban A

34. Berikut ini termasuk syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, kecuali ...

- A. Warga Negara Indonesia
- B. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
- C. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
- D. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- E. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Jawaban B

35. Pasca melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah...

- A. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap
- B. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
- C. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK
- D. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- E. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara (DPS)

Jawaban C

36. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini dibantu oleh ...

- A. Pantarlih
- B. Pantarlih dan PPS
- C. Pantarlih, PPS, dan PPK
- D. Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK
- E. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan Pengawas Pemilu

Jawaban C

37. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, syarat untuk menjadi calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Wapres) diatur dalam:

- A. Undang-Undang Dasar
- B. Undang-Undang
- C. Peraturan Pemerintah
- D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
- E. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)

Jawaban B

38. Apa kepanjangan dari singkatan PKPU?

- A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- B. Perubahan Keputusan Pemilihan Umum
- C. Peraturan Khusus Perundang-Undangan
- D. Perubahan Khusus Perundang-Undangan
- E. Penambahan Keputusan Pemilihan Umum

Jawaban A

39. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama:

- A. 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan
- B. 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan
- C. 35 (tiga puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan
- D. 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan
- E. 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya permohonan

Jawaban B

40. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama...

- A. 30 (tiga puluh) hari kerja
- B. 15 (lima belas) hari kerja
- C. 14 (empat belas) hari kerja
- D. 7 (tujuh) hari kerja
- E. 3 (tiga) hari kerja

Jawaban D

41. Berikut beberapa profesi yang tak boleh menjadi anggota partai kecuali:

- A. Kepala Desa
- B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- C. Perangkat Desa
- D. Lembaga Swadaya Masyarakat
- E. Tenaga Pendamping Desa

Jawaban no 41 dengan pembahasan sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 huruf (g) menyatakan: “Kepala Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 51 huruf (g) menyatakan: “Perangkat Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 64 huruf (h) yang berbunyi: “Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: (h). menjadi pengurus partai politik.”

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, menyatakan: “.... Dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai seorang profesional, TPP dilarang: (17). menjabat dalam kepengurusan partai politik.”

Jadi untuk jawaban no 41 adalah D.